



ISSN : 25273132 E-ISSN : 25033379

Special Issue Policy Brief and Policy Paper February, 2024

TANTANGAN DAN DAMPAK PUTUS PAKAI KONTRASEPSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Rizky Surya Triadi

Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Email: recir82@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Keluarga Berencana (KB) telah menjadi salah satu bagian integral dari kebijakan pembangunan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Meskipun pencapaian dalam meningkatkan akses dan kesadaran tentang kontrasepsi telah terjadi, tantangan yang signifikan masih ada, terutama terkait dengan putus pakai kontrasepsi. Putus pakai kontrasepsi dapat merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, mempengaruhi pencapaian target keluarga berencana, serta memiliki dampak yang luas pada kesehatan reproduksi dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Fenomena putus pakai kontrasepsi merujuk pada penghentian penggunaan metode kontrasepsi oleh individu atau pasangan yang sebelumnya telah menggunakan metode tersebut. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk keinginan untuk memiliki anak, perubahan keadaan hidup, efek samping yang tidak diinginkan, atau bahkan faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi akses terhadap kontrasepsi. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan yang terkait dengan putus pakai kontrasepsi menjadi krusial dalam upaya meningkatkan pemahaman dan praktik kesehatan reproduksi yang lebih baik.

Dalam era yang dipenuhi dengan kemajuan medis dan teknologi, upaya untuk mengelola keluarga dan merencanakan kehamilan telah menjadi bagian integral dari perawatan kesehatan reproduksi. Kontrasepsi, dalam berbagai bentuk dan jenisnya, telah memungkinkan pasangan untuk mengontrol jumlah dan penjadwalan kelahiran anak-anak mereka, memberikan kontrol yang lebih besar terhadap masa depan keluarga mereka. Namun, di tengah manfaat-manfaat tersebut, tantangan-tantangan yang terkait dengan penggunaan dan putus pakai kontrasepsi tetap menjadi fokus utama dalam domain perawatan kesehatan reproduksi.

Putus pakai kontrasepsi, yang dapat didefinisikan sebagai penghentian penggunaan kontrasepsi sebelum mencapai kehamilan yang diinginkan, merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial. Tantangan ini meliputi faktor-faktor seperti kurangnya informasi yang tepat tentang kontrasepsi, perubahan preferensi atau kebutuhan kontrasepsi, mitos dan stigma budaya terkait kontrasepsi, ketidakmampuan memperoleh kontrasepsi secara terus-menerus, serta masalah kesehatan yang mungkin timbul selama penggunaan kontrasepsi.

Dampak putus pakai kontrasepsi mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi secara langsung pencapaian target keluarga berencana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara kesehatan reproduksi, putus pakai kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan komplikasi kesehatan lainnya, seperti kehamilan remaja, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta

penularan penyakit menular seksual. Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari putus pakai kontrasepsi juga dapat signifikan, termasuk stres psikologis, konflik interpersonal, dan peningkatan beban ekonomi bagi keluarga.

Untuk mengatasi tantangan putus pakai kontrasepsi dan meminimalkan dampaknya, diperlukan upaya lintas sektoral yang komprehensif dan terpadu. Pertama, perlu meningkatkan akses dan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat tentang kontrasepsi, termasuk edukasi yang menyeluruh tentang manfaat, risiko, dan efek sampingnya. Selain itu, strategi komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi mitos dan stigma terkait kontrasepsi. Kedua, pelayanan kesehatan reproduksi harus ditingkatkan, termasuk penyediaan kontrasepsi secara terus-menerus dan aksesibilitas ke layanan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program keluarga berencana dan mengatasi tantangan putus pakai kontrasepsi di Indonesia.

Pertama, Peningkatan pemahaman masyarakat/pasangan usia subur (PUS) pentingnya program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi : Pemerintah harus melakukan kampanye program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi secara agresif dan berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk iklan televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di komunitas, Mobil Unit Penerangan (Mupen) dapat dipergunakan untuk melakukan KIE kepada masyarakat sampai ketingkat kecamatan. Selain itu peran dari petugas/penyuluh KB dilapangan beserta kader KB perlu dioptimalkan dalam melakukan pendampingan kepada peserta KB, .

Kedua, Peningkatan Akses pada pelayanan kontrasepsi : Pemerintah wajib untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana, keterpenuhan akan kontrasepsi serta pelayanan dari tenaga kesehatan yang berkualitas wajib disediakan oleh pemerintah.

Tantangan putus pakai kontrasepsi memiliki dampak terhadap pencapaian target keluarga berencana dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis bukti, tantangan ini dapat diatasi dan dampaknya dapat diminimalkan. Implementasi kebijakan yang berorientasi pada upaya lintas sektoral, pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan reproduksi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Pendahuluan 1.1 Gambaran Umum tentang Keluarga Berencana di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki beragam tantangan dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sejak dekade pertama abad ke-20, pemerintah Indonesia telah aktif terlibat dalam upaya keluarga berencana sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah demografi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sejarah program keluarga berencana di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an, tetapi upaya serius untuk mengelola pertumbuhan penduduk baru dimulai pada awal tahun 1970-an. Pada periode ini, Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk yang signifikan, mendorong pemerintah untuk merespons dengan membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970.

BKKBN menjadi motor penggerak utama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keluarga berencana di seluruh Indonesia. Pada awalnya, fokus program ini adalah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kontrasepsi. Program tersebut kemudian berkembang menjadi kampanye yang lebih

komprehensif, mencakup edukasi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan dukungan untuk perencanaan keluarga.

Keluarga berencana telah diakui secara luas sebagai strategi kunci untuk mencapai tujuan demografi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penguatan Program Keluarga Berencana

Dalam konteks ini, keluarga berencana tidak hanya melibatkan pengaturan jumlah anak, tetapi juga mencakup aspek-aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.

Salah satu tujuan utama keluarga berencana adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk. Indonesia, dengan populasi yang terus berkembang pesat, menyadari bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan tekanan yang signifikan pada sumber daya alam, ekonomi, dan layanan kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,1 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, melalui program keluarga berencana, pemerintah berupaya memberikan solusi yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya yang ada.

Selain itu, keluarga berencana juga memiliki dampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, program keluarga berencana mendukung ibu dan ayah dalam mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan jarak kelahiran anak, pemilihan metode kontrasepsi, dan perawatan prenatal yang tepat. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

Keluarga berencana juga merupakan alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat pendidikan. Keluarga yang dapat merencanakan jumlah anak mereka dengan baik cenderung memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk pendidikan anak-anak mereka, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan

Meskipun pencapaian keluarga berencana di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks memengaruhi penerimaan dan penerapan program keluarga berencana di berbagai wilayah. Oleh karena itu, terus ada kebutuhan untuk meningkatkan akses, edukasi, dan dukungan masyarakat agar program ini lebih efektif dan berkelanjutan.

Program keluarga berencana (KB) memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bongaarts & Casterline, 2013). Namun demikian, Salah satu tantangan utama yang dihadapi program KB adalah ketidaksetaraan akses dan pemahaman mengenai informasi serta layanan antara kelompok masyarakat (Cleland & Sinding, 2017). Oleh karena itu, langkah-langkah strategis

perlu diambil untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan KB.

Sebagai harapan untuk masa depan, penting untuk terus memperkuat program keluarga berencana dengan mengintegrasikan pendekatan yang holistik, melibatkan semua pihak terkait, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju menuju tujuan demografi yang seimbang dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

1.3 Kontrasepsi sebagai Elemen Kunci dalam Pencapaian Target Keluarga Berencana di Indonesia

Pada era modern ini, kontrasepsi menjadi elemen kunci dalam upaya mencapai target keluarga berencana di Indonesia (BKKBN, 2021). Dengan penduduk yang terus berkembang, kontrol terhadap pertumbuhan populasi melalui program keluarga berencana menjadi suatu kebutuhan mendesak. Salah satu instrumen paling efektif dalam mencapai tujuan ini adalah penerapan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi yang baik, memberikan masyarakat kontrol yang lebih baik terhadap jumlah anak yang diinginkan, waktu kelahiran, dan jarak antar kehamilan (Titaley et al, 2012).

Dalam upaya mencapai target keluarga berencana, kontrasepsi memegang peran sentral sebagai alat yang efektif dalam mengontrol jumlah anak dan menjamin kesejahteraan keluarga. Di Indonesia, kontrasepsi bukan hanya sekadar alat untuk mencegah kehamilan, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam strategi pencapaian tujuan demografi, kesejahteraan keluarga, dan perkembangan berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Beberapa peran krusial kontrasepsi, antara lain:

a) **Pengendalian Pertumbuhan Penduduk:**

Kontrasepsi berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap metode kontrasepsi, keluarga dapat merencanakan jumlah anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, mencegah pertumbuhan populasi yang tidak terkendali.

b) **Kesehatan Reproduksi:**

Kontrasepsi juga berkontribusi pada kesehatan reproduksi perempuan dengan memberikan kontrol lebih besar terhadap jarak antara kelahiran anak. Ini membantu mengurangi risiko komplikasi kesehatan ibu dan anak, serta memberikan perempuan kesempatan untuk pulih sepenuhnya antara kehamilan.

c) **Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi:**

Dengan merencanakan keluarga, pasangan dapat mengelola sumber daya ekonomi mereka dengan lebih baik. Keluarga yang dapat memilih kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk pendidikan anak-anak dan perbaikan standar hidup keluarga.

d) **Pemberdayaan Perempuan:**

Kontrasepsi memberikan perempuan kontrol lebih besar terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan tetapi juga mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

1.4 Pentingnya Penelitian tentang Putus Pakai Kontrasepsi

Penelitian tentang putus pakai kontrasepsi menjadi esensial dalam konteks Indonesia, hal ini semata-mata dalam rangka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi, untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi peningkatan efektivitas program keluarga berencana. Tingkat putus pakai kontrasepsi

menjadi salah satu ukuran kualitas pemakaian alat kontrasepsi. Tingkat putus pakai dapat mencakup kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan akseptor terhadap alat/cara KB, efek samping KB, dan ketidaktersediaan alat kontrasepsi baik jenis maupun jumlahnya Glasier A (2006). Berikut adalah alasan mengapa topik penelitian ini sangat penting:

- Memahami Penyebab Putus Pakai Kontrasepsi: Penelitian membantu mengidentifikasi penyebab utama di balik putus pakai kontrasepsi. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman, faktor budaya, atau kendala akses, pemahaman yang lebih baik akan membantu merancang solusi yang lebih efektif.
- Mengoptimalkan Edukasi dan Informasi: Penelitian membantu merinci keberhasilan atau kegagalan program edukasi dan informasi mengenai kontrasepsi. Ini memungkinkan penyesuaian strategi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- Menyesuaikan Layanan Kesehatan Reproduksi: Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengguna kontrasepsi, penyedia layanan kesehatan dapat menyesuaikan pendekatan mereka. Hal ini termasuk memberikan layanan konseling yang lebih baik, meningkatkan ketersediaan metode kontrasepsi, atau bahkan mengatasi stigma terkait kontrasepsi.
- Meningkatkan Dukungan Masyarakat: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi cara meningkatkan dukungan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi. Melibatkan masyarakat dalam proses ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan keluarga berencana.

1.5 Permasalahan Utama Terkait Putus Pakai Kontrasepsi di Indonesia

Di tengah upaya menuju keluarga berencana yang lebih efektif, Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan utama terkait putus pakai kontrasepsi (BKKBN, 2019). Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain:

- Kendala Budaya dan Sosial:
Beberapa komunitas masih mempertahankan norma-norma budaya yang dapat menghambat penggunaan kontrasepsi. Stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang manfaat kontrasepsi dapat menjadi hambatan utama.
- Ketersediaan dan Aksesibilitas:
Di beberapa daerah, ketersediaan metode kontrasepsi mungkin terbatas. Aksesibilitas yang rendah terhadap layanan kesehatan reproduksi dapat menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menggunakan kontrasepsi.
- Kurangnya Pemahaman:
Pemahaman yang kurang tentang berbagai metode kontrasepsi dan efek sampingnya dapat menyebabkan putus pakai yang tidak diinginkan atau kegagalan penggunaan.
- Peran Laki-laki dalam Keputusan Keluarga Berencana:
Pendidikan dan partisipasi laki-laki dalam keputusan keluarga berencana masih perlu ditingkatkan. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan laki-laki dapat membantu menciptakan keputusan yang lebih bersama-sama dan mendukung.

Dengan memahami dan mengatasi permasalahan utama ini melalui penelitian dan pengambilan kebijakan yang sesuai, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dalam pencapaian target keluarga berencana. Penelitian dan tindakan yang terinformasi dengan baik akan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang berencana, sehat, dan berkelanjutan di masa depan.

Deskripsi Masalah	Meningkatnya prosentase ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi tahun 2022 menjadi 21,6%, dibandingkan tahun 2021 sebesar 21,00% (Laporan Perhitungan IKU,2022)
--------------------------	---

Hasil dan Pembahasan	<p>2.1. Penyebab Tingginya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi</p> <p>Indonesia menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi (Smith, J., et al, 2020). Tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi di Indonesia menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada pertumbuhan penduduk yang cepat. Berbagai faktor dapat menyebabkan tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi ini, dan hal tersebut melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keputusan individu atau keluarga untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi (Samosir et al, 2019).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Faktor Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Pendidikan Seksual: Pendidikan seksual yang kurang memadai di Indonesia dapat menjadi penyebab utama tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi. Kurangnya pemahaman mengenai metode kontrasepsi, manfaatnya, dan cara penggunaannya dapat memicu ketidakpastian dan keputusan untuk berhenti menggunakan kontrasepsi- Pengaruh Agama dan Norma Sosial Nilai-nilai agama dan norma sosial seringkali memainkan peran besar dalam keputusan penggunaan kontrasepsi. Beberapa agama atau budaya mungkin menolak atau menghambat penggunaan kontrasepsi, menyebabkan tingkat putus pakai yang lebih tinggi.2. Faktor Budaya:<ul style="list-style-type: none">- Stigma terhadap Kontrasepsi: Beberapa masyarakat masih menghadapi stigma terkait penggunaan kontrasepsi. Ketakutan akan penilaian sosial atau stigma dapat mendorong individu atau pasangan untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.- Peran Gender: Peran gender yang masih kental di beberapa komunitas bisa menjadi faktor penting. Adanya tekanan budaya untuk memiliki banyak anak atau keinginan untuk memiliki keturunan laki-laki dapat mempengaruhi keputusan berhenti menggunakan kontrasepsi.3. Faktor Ekonomi:<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan Akses dan Biaya: Keterbatasan akses fisik maupun ekonomi terhadap kontrasepsi bisa menyebabkan putus pakai. Biaya yang tinggi atau ketersediaan yang rendah dapat menjadi penghalang serius bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.- Kondisi Ekonomi Keluarga: Keluarga yang berjuang ekonominya mungkin menganggap bahwa memiliki lebih banyak anak dapat membantu dalam usaha pertanian atau pekerjaan lainnya. Ini dapat mendorong mereka untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.4. Faktor Kesehatan:<ul style="list-style-type: none">- Efek Samping yang Tidak Diinginkan: Beberapa metode kontrasepsi mungkin menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, baik fisik maupun mental. Ini bisa menjadi motivasi utama untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.- Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi:
-----------------------------	---

Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi, dapat menjadi hambatan serius, terutama di daerah pedesaan.

5. Faktor Psikologis:

- Keinginan untuk Menjalani Kehidupan Tradisional:
Beberapa individu atau keluarga mungkin memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup yang lebih tradisional, yang melibatkan keluarga besar dan banyak anak.
- Tidak Siap Secara Psikologis:
Beberapa individu mungkin tidak merasa siap secara psikologis untuk menghadapi tanggung jawab orangtua, yang dapat menjadi pendorong untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi.

Dalam rangka mengatasi tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi, perlu dilakukan upaya secara holistik yang melibatkan pendidikan seksual yang lebih baik, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan perubahan norma sosial yang mendukung penggunaan kontrasepsi. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek budaya dan religiusitas dalam merancang kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

2.2. Dampak Putus Pakai Kontrasepsi Terhadap Pencapaian Target Keluarga Berencana

Pencapaian target keluarga berencana merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan kontrasepsi menjadi salah satu strategi utama untuk mengontrol pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Namun, ketika seseorang memutuskan untuk putus pakai kontrasepsi, dampaknya dapat terasa dalam berbagai aspek, termasuk demografi, kesehatan reproduksi, dan ekonomi (United Nation - Sustainable Development Goals: Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, 2015).

1. Dampak Demografis:

Praktek putus pakai kontrasepsi dapat memengaruhi secara signifikan tingkat kelahiran suatu populasi. Ketika pasangan memilih untuk tidak melanjutkan penggunaan kontrasepsi, kemungkinan untuk memiliki anak meningkat. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan populasi yang lebih cepat dari yang direncanakan, sehingga menciptakan tekanan tambahan pada sumber daya masyarakat. Dalam beberapa kasus, peningkatan cepat dalam jumlah kelahiran dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya, seperti pendidikan dan pekerjaan.

2. Kesehatan Reproduksi:

Dampak kesehatan reproduksi dari putus pakai kontrasepsi dapat bersifat kompleks. Meskipun kehamilan yang diinginkan dapat memberikan kebahagiaan dan pemenuhan bagi pasangan, kehamilan yang tidak direncanakan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Pasangan yang memutuskan putus pakai kontrasepsi tanpa perencanaan yang matang mungkin menghadapi risiko komplikasi kehamilan, seperti kelahiran prematur atau komplikasi kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan terkait kontrasepsi perlu dipertimbangkan secara matang guna menjaga kesehatan reproduksi ibu dan anak.

3. Ekonomi:

Keputusan untuk putus pakai kontrasepsi juga dapat memengaruhi aspek ekonomi keluarga. Pertambahan anggota keluarga tanpa perencanaan dapat menimbulkan beban finansial yang tidak terduga. Pendidikan anak-anak, pengeluaran kesehatan, dan

kebutuhan dasar lainnya akan meningkat, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks lebih luas, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali juga dapat memberikan tekanan ekonomi pada tingkat nasional, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

Penting untuk memahami bahwa dampak putus pakai kontrasepsi bukanlah fenomena tunggal, melainkan terkait erat dengan berbagai faktor termasuk budaya, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan edukasi yang lebih baik mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kontrasepsi perlu diterapkan.

Pemerintah dan organisasi kesehatan masyarakat perlu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari putus pakai kontrasepsi yang tidak terencana. Program edukasi yang mencakup informasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan akses mudah terhadap metode kontrasepsi dapat membantu mengurangi risiko dampak negatif.

Putus pakai kontrasepsi dapat memiliki dampak yang signifikan pada pencapaian target keluarga berencana, baik dari segi demografi, kesehatan reproduksi, maupun ekonomi. Pendidikan, kesadaran, dan dukungan yang baik dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mengelola praktek ini dengan bijak demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan inisiatif yang sangat penting dalam mengelola pertumbuhan populasi, mempromosikan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan atau kegagalan dari program keluarga berencana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, serta faktor-faktor lain yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program (Cleland & Shah, 2014). Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Population Reference Bureau (2021), salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dan positif dari masyarakat sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program. Masyarakat yang terlibat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan keluarga, konsekuensi dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, dan manfaat kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan dan pendidikan masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam implementasi program ini.

Selain itu, nilai-nilai budaya dan agama dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi dalam Program Keluarga Berencana. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi program harus memperhatikan kepekaan terhadap nilai-nilai ini dan menyusun strategi komunikasi yang sesuai. Dukungan dari tokoh agama dan budaya dalam suatu komunitas juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi resistensi atau ketidaksetujuan terhadap program.

Dukungan pemerintah adalah faktor lain yang kritis dalam menentukan keberhasilan Program Keluarga Berencana. Keterlibatan pemerintah dalam menyediakan dana, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung sangat diperlukan. Kebijakan yang mendukung, termasuk insentif atau sanksi yang sesuai, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi program. Selain itu, adanya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga terkait juga perlu diperhatikan agar program dapat berjalan dengan efektif.

Faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan Program Keluarga Berencana melibatkan aspek-aspek kesehatan dan layanan medis. Aksesibilitas terhadap informasi, layanan

kesehatan reproduksi, dan metode kontrasepsi yang beragam adalah faktor krusial. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan tenaga kesehatan yang terlatih akan membantu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program.

Selain itu, aspek ekonomi juga memainkan peran penting. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang stabil lebih mungkin untuk dapat merencanakan keluarga mereka dengan baik. Oleh karena itu, program keluarga berencana juga harus mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam menjalankan program ini, pendekatan yang melibatkan komunitas dan bersifat holistik akan lebih berhasil. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan Program Keluarga Berencana. Pemantauan dan evaluasi yang berkala juga penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan mengajukan perbaikan yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan faktor-faktor ini, Program Keluarga Berencana memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta keterlibatan dan dukungan semua pihak menjadi kunci dalam mencapai sasaran program ini dan memastikan keluarga dapat merencanakan kehidupan mereka dengan baik.

Pilihan Kebijakan

Pertumbuhan populasi yang cepat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat mendorong perlunya peningkatan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi. Kontrasepsi bukan hanya merupakan alat untuk mengendalikan pertumbuhan populasi, tetapi juga merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, mengurangi angka kehamilan tidak direncanakan, dan memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu dalam merencanakan keluarga (World Health Organization - Family planning/Contraception, 2019). Dalam konteks ini, kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan pemahaman terhadap kontrasepsi menjadi esensial. Pendekatan pendidikan dan kampanye sosial menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Ditambahkan bahwa peningkatan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam era modern ini, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan ketersediaan kontrasepsi menjadi kunci untuk mencapai tujuan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang optimal.

Akses yang lebih luas terhadap berbagai metode kontrasepsi adalah langkah positif menuju pemberdayaan individu, terutama perempuan, dalam mengelola rencana keluarga mereka (Cleland et al, 2012). Pendidikan yang mendalam tentang berbagai pilihan kontrasepsi memungkinkan individu membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ini tidak hanya menciptakan keputusan yang lebih sadar, tetapi juga mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Peningkatan pemahaman tentang kontrasepsi juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, individu dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan gaya hidup mereka. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi angka kehamilan yang berisiko dan memastikan kesejahteraan ibu dan anak.

Selain itu, peningkatan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan populasi. Dengan memberikan akses yang lebih baik, masyarakat dapat menghindari tekanan berlebih pada sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, dengan kemampuan untuk memberikan

pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih efisien, dan peluang ekonomi yang lebih besar.

Dalam menghadapi tantangan global, upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-profit, dan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan yang bijaksana mengenai rencana keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan, untuk meningkatkan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi (American College of Obstetricians and Gynecologists - Access to Contraception, 2015):

a) Peningkatan Akses Kontrasepsi Melalui Kesehatan Reproduksi

Salah satu langkah krusial dalam meningkatkan akses kontrasepsi adalah melalui penguatan sistem kesehatan reproduksi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup penyediaan kontrasepsi modern, informasi yang jelas, serta layanan konseling yang ramah dan tanpa diskriminasi. Langkah-langkah ini dapat melibatkan pembangunan pusat kesehatan reproduksi di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, termasuk di desa-desa terpencil. Fasilitas kesehatan harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan informasi dan pelayanan kontrasepsi. Pemenuhan hak reproduksi menjadi landasan utama, dan akses yang setara untuk semua lapisan masyarakat harus ditekankan.

b) Kebijakan Kesehatan Reproduksi Di Sekolah

Pendidikan tentang kesehatan reproduksi di sekolah menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi. Kebijakan pendidikan seksual yang komprehensif dan inklusif harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Materi pembelajaran harus mencakup informasi tentang berbagai metode kontrasepsi, cara penggunaannya, serta manfaat dan risikonya. Pendidikan seksual tidak hanya tentang mencegah kehamilan, tetapi juga tentang penghargaan terhadap tubuh, hak-hak reproduksi, dan tanggung jawab dalam hubungan. Melibatkan orang tua dalam program ini juga penting agar tercipta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak-anak mereka mengenai kesehatan reproduksi.

c) Kampanye Sosial Dan Media

Kampanye sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi. Penggunaan media massa, jejaring sosial, dan kampanye di komunitas lokal dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman metode kontrasepsi yang tersedia. Dalam kampanye ini, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan tenaga kesehatan sebagai duta untuk menyampaikan pesan positif tentang pentingnya kontrasepsi. Kampanye tersebut harus memberikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat target.

d) Subsidi Kontrasepsi

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan aksesibilitas kontrasepsi adalah pemberian subsidi atau harga yang terjangkau. Pemerintah dapat bekerja sama dengan produsen kontrasepsi untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau atau bahkan memberikan secara gratis untuk kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan dukungan ekonomi. Subsidi kontrasepsi dapat mencakup program-program khusus untuk remaja atau kelompok ekonomi rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan

akses ke metode kontrasepsi. Dengan demikian, hambatan ekonomi yang seringkali menjadi penghalang utama dapat diatasi.

e) **Pembinaan Dan Pengembangan Kader Keluarga Berencana**

Pembinaan dan pengembangan kader keluarga berencana dapat menjadi kebijakan tambahan yang efektif. Kader keluarga berencana dapat memberikan informasi langsung ke masyarakat, melakukan konseling, dan membantu dalam pelayanan kontrasepsi. Mereka dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem kesehatan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

f) **Evaluasi Dan Penyempurnaan Kebijakan**

Sejalan dengan implementasi kebijakan-kebijakan di atas, evaluasi berkala diperlukan untuk menilai keberhasilan dan kendala yang mungkin muncul. Evaluasi ini dapat melibatkan survei masyarakat, analisis data kesehatan reproduksi, dan umpan balik dari berbagai pihak terkait. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan, menyesuaikannya dengan perubahan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan efektivitasnya.

Peningkatan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kebijakan yang mendukung aksesibilitas kontrasepsi dan pemahaman masyarakat harus berbasis hak, inklusif, dan memperhatikan keberagaman budaya serta konteks lokal. Dengan mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kampanye sosial, subsidi, dan pengembangan kader kesehatan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat dalam membuat pilihan yang berpusat pada keinginan dan kebutuhan mereka. Peningkatan akses dan pemahaman ini bukan hanya menguntungkan individu dan keluarga, tetapi juga merupakan langkah kritis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2. Edukasi dan Pendampingan untuk Meningkatkan Kesadaran akan Dampak Putus Pakai Kontrasepsi

Kesehatan reproduksi merupakan aspek krusial dari kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan kesehatan reproduksi adalah penggunaan kontrasepsi. Meskipun kontrasepsi memberikan banyak manfaat, putus pakai kontrasepsi dapat menyebabkan dampak negatif, seperti peningkatan risiko kehamilan tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual (Williamson et al, 2009). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak putus pakai kontrasepsi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat. Menurut Lundsberg (2017) terdapat beberapa cara dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak putus pakai kontrasepsi, diantaranya dengan:

a) **Kebijakan Pendidikan**

Sebagai langkah awal, penerapan kebijakan pendidikan yang menyeluruh tentang kesehatan reproduksi di sekolah dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan dampak putus pakai kontrasepsi. Kurikulum kesehatan reproduksi harus mencakup informasi mendalam tentang berbagai metode kontrasepsi, termasuk risiko dan manfaat masing-masing. Selain itu, pembelajaran harus difokuskan pada aspek-aspek psikologis dan sosial dari keputusan untuk menggunakan kontrasepsi. Pentingnya integrasi pendidikan seksual yang holistik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap implikasi putus pakai kontrasepsi. Program-program ini harus mencakup aspek etika, tanggung jawab, dan hubungan interpersonal. Guru-guru

dan staf sekolah harus dilibatkan dalam pelatihan khusus untuk memberikan materi dengan cara yang informatif dan mendukung.

b) Pendampingan di Pusat Kesehatan

Pusat kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada individu yang mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi. Kebijakan kesehatan harus mencakup penyediaan layanan konseling yang komprehensif. Tenaga kesehatan di pusat-pusat kesehatan harus mampu memberikan informasi yang akurat dan membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kontrasepsi. Pendampingan melibatkan aspek-aspek seperti penyuluhan tentang risiko dan manfaat setiap metode kontrasepsi, pemahaman terhadap tubuh dan siklus menstruasi, serta dukungan emosional untuk membantu individu mengatasi kekhawatiran atau ketidakpastian. Kebijakan ini harus menekankan pentingnya privasi dan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

c) Program Masyarakat

Penguatan kesadaran masyarakat melalui program-program komunitas juga penting. Keterlibatan masyarakat dapat melibatkan pendekatan seperti kelompok diskusi, seminar, dan kampanye penyuluhan di tingkat lokal. Keberhasilan program ini tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan organisasi nirlaba, lembaga pendidikan, dan pemerintah setempat. Selain itu, menciptakan akses mudah ke informasi tentang kontrasepsi melalui media sosial dan platform digital juga dapat menjadi inisiatif yang efektif. Kampanye online dapat menjangkau berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh sebanyak mungkin individu.

d) Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan

Penting untuk melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan program yang diterapkan. Data mengenai pengetahuan masyarakat, perilaku, dan hasil kesehatan harus dikumpulkan secara sistematis untuk menilai efektivitas intervensi. Pembaruan terhadap kurikulum pendidikan, penyediaan sumber daya bagi pusat kesehatan, dan peningkatan program komunitas harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan para ahli kesehatan reproduksi, psikolog, dan ahli pendidikan dapat membantu menyempurnakan kebijakan dan program yang ada. Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, kita dapat mencapai peningkatan kesadaran yang signifikan tentang dampak putus pakai kontrasepsi di masyarakat.

Edukasi dan pendampingan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak putus pakai kontrasepsi. Melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, pendampingan di pusat kesehatan, dan program-program komunitas yang terarah, kita dapat mencapai perubahan positif dalam perilaku dan pengetahuan seputar kontrasepsi. Upaya bersama ini tidak hanya berpotensi mengurangi risiko kesehatan reproduksi yang tidak diinginkan, tetapi juga memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang informasional dan bertanggung jawab terkait dengan kesehatan reproduksi mereka.

Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan Putus Pakai Kontrasepsi

Tantangan putus pakai kontrasepsi merupakan isu kesehatan dan sosial yang penting di berbagai masyarakat. Meskipun berbagai metode kontrasepsi telah disediakan, banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Tantangan dalam permasalahan ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi	Rekomendasi Kebijakan
<p>Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat/pasangan usia subur (PUS) pentingnya program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN harus melakukan upaya upaya : <ol style="list-style-type: none"> a. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi membuat pedoman khusus dalam melakukan kampanye program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi serta akibat dari ketidaklangsungan pemakaian kontrasepsi secara agresif dan berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk iklan televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di komunitas. b. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Mereformulasi Panduan Operasional Mobil Unit Penerangan (Mupen) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi. c. Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi membuat pedoman untuk memastikan peran dari petugas/penyuluh lapangan serta kader KB untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman program keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi termasuk memantau penggunaan kontrasepsi. 2. BKKBN dan Kementerian Pendidikan melakukan perjanjian kerja sama untuk membangun program edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi, termasuk informasi yang akurat tentang berbagai jenis kontrasepsi, manfaatnya, risiko, dan cara penggunaannya dengan tepat.
<p>Peningkatan Akses pada pelayanan kontrasepsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Utama BKKBN membuat surat edaran untuk memastikan ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan tercukupi agar tidak terjadi <i>stock out</i> alat kontrasepsi. 2. Kementerian Kesehatan wajib memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih di setiap fasilitas

	<p>kesehatan yang ada untuk memberikan pelayanan keluarga berencana.</p> <p>3. Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan infrastruktur kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) untuk dapat memudahkan masyarakat mengakses pelayanan keluarga berencana.</p>
--	---

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). Access to Contraception. <https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/clinical/files/committee-opinion/articles/2015/01/access-to-contraception.pdf>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Laporan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Indonesia Population Projection 2020-2045.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2019). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Indonesia 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/6a5ebe1b5b8edc1c750f3b15/statistik-penduduk-indonesia-2020.html>
- Bongaarts, J., & Casterline, J. (2013). Fertility transition: Is sub-Saharan Africa different? *Population and Development Review*, 38(Suppl 1), 153-168.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and Health. *The Lancet*, 380(9837), 149-156.
- Cleland, J., & Sinding, S. (2017). The step change in the evolution of family planning: the contribution of social science. *Global Public Health*, 12(5), 528-538.
- Cleland, J., Harbison, S., & Shah, I. H. (2014). Unmet Need for Contraception: Issues and Challenges. *Studies in Family Planning*, 45(2), 105-122.
- Family Planning 2020. (2017). FP2020: Catalyzing Collaboration 2016-2017. Retrieved from <http://progress.familyplanning2020.org/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Profil Kesehatan Indonesia 2016.
- Population Reference Bureau. (2021). Family Planning and Reproductive Health Indicators Database. Retrieved from <https://www.prb.org/data/>
- Samosir, Omas B., Ayke S. Kiting, and Flora Aninditya. 2019. Determinants of Contraceptive Discontinuation in Indonesia: Further Analysis of the 2017 Demographic and Health Survey. DHS Working Paper No. 159. Rockville, Maryland, USA: ICF.
- Smith, J., et al. (2020). "Addressing Contraceptive Discontinuation in Indonesia: Insights from a Community-Based Qualitative Study." *Journal of Reproductive Health*, 17(1), 28-41.
- Titaley, C. R., Dibley, M. J., Roberts, C. L., & Hall, J. (2012). Factors associated with non-utilisation of postnatal care services in Indonesia. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66(1), 21-27.
- Lundsberg, L. S., Pal, L., Garipey, A. M., Xu, X., Chu, M. C., & Illuzzi, J. L. (2017). Knowledge, attitudes, and practices regarding conception and fertility: a population-based survey among reproductive-age United States women. *Fertility and Sterility*, 108(3), 502-511.
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goals: Goal 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3>
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). Programme of Action of the International Conference on Population and Development. Retrieved from https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
- Williamson, L. M., Parkes, A., Wight, D., Petticrew, M., & Hart, G. J. (2009). Limits to modern contraceptive use among young women in developing countries: a systematic review of qualitative research. *Reproductive Health*, 6(1), 3.
- World Health Organization. (2019). Family planning/Contraception. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/family-planning-contraception>

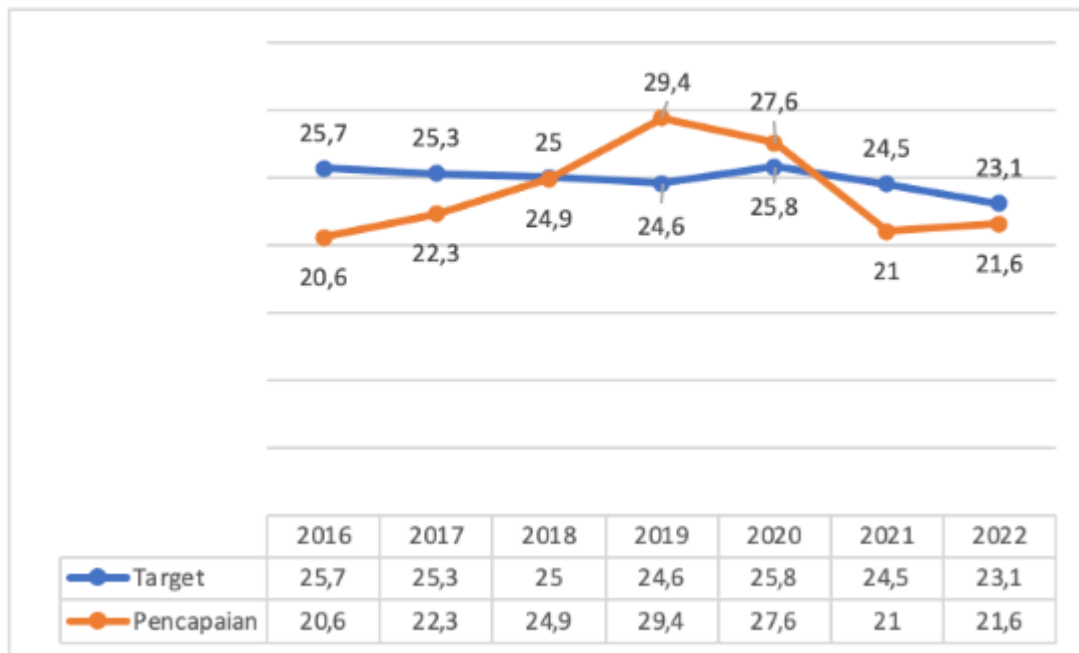
Lampiran

Tabel 1.
Target Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)

Tahun	Target
2020	25,79
2021	24,50
2022	23,10
2023	21,59
2024	20,00

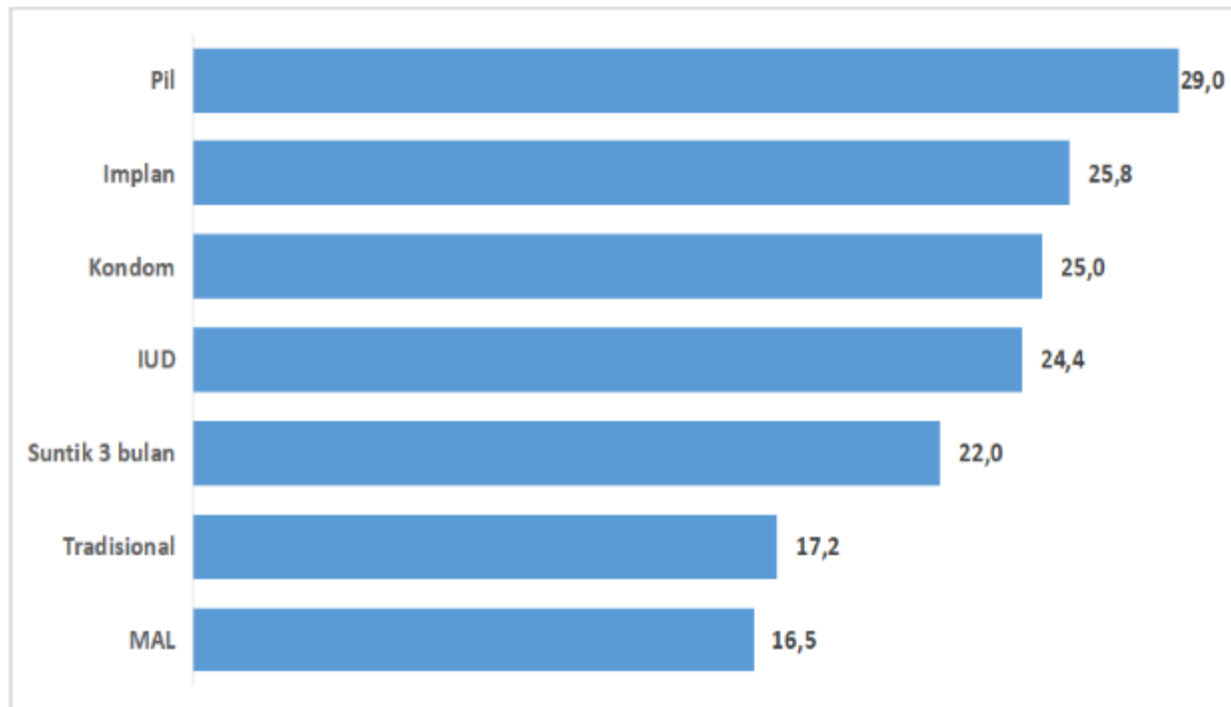
Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Gambar 1
Trend Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi 2016–2021



Sumber: Laporan Perhitungan IKU BKKBN tahun 2022

Gambar 2
Tingkat Putus Pakai Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2022



Sumber : Laporan Perhitungan IKU BKKBN tahun 2022